

## Pemberdayaan Perempuan Dalam Perwali Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya

Sefty Maharani Devi<sup>1</sup> Agus Sukristyanto<sup>2</sup> Muhammad Roisul Basyar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telp: +628970356519

E-mail: [devimaharani546@gmail.com](mailto:devimaharani546@gmail.com)<sup>1</sup>, [agussukris@untag-sby.ac.id](mailto:agussukris@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>, [roisulbasyar@untag-sby.ac.id](mailto:roisulbasyar@untag-sby.ac.id)<sup>3</sup>

### KEYWORDS

Women's Empowerment  
Gender Mainstreaming  
Public Policy

### Kata Kunci

Pemberdayaan Perempuan  
Pengarusutamaan Gender  
Kebijakan Publik

### ABSTRACT

*As a form of gender-responsive transformation, the Surabaya City Government participates in the development process by formulating gender mainstreaming policies. To accelerate gender mainstreaming in development in Surabaya City, concrete actions are needed from the Surabaya City Government in planning, formulation, implementation, budgeting, monitoring, and evaluation of development policies, programs, and activities that are gender-responsive. The Surabaya City Government has issued regulations on gender mainstreaming as part of its efforts to establish a gender-responsive city through various programs that empower women. This situation has prompted research into how women are empowered through the issuance of Regulation Number 43 of 2020 on Gender Mainstreaming in the City of Surabaya. This was analyzed using Naila Kabeer's (1999) theory of women's empowerment, which encompasses three main dimensions: resources, agency, and achievements. The research findings indicate that women's empowerment through the policy of Regulation No. 43 of 2020 on Gender Mainstreaming in the City of Surabaya has been implemented through various programs and innovations, such as the Informal Women's School (SEKOPER) 'Srikandi', Women's Musrenbang, and the strengthening of Gender-Responsive Districts (KRG) and Women-Friendly and Child-Caring Neighborhoods (KRPPA). This study focuses solely on one program, namely the Informal Women's School (SEKOPER) 'Srikandi'. This program serves as a learning platform for vulnerable women or single parents, aiming to strengthen the concept of motivation within the social environment.*

*From a resource perspective, the Women's School Srikandi program has improved women's access to education and economic training. The agency dimension is reflected in increased women's participation in decision-making and policy-making. In terms of outcomes, there have been positive impacts, including increased income, self-confidence, and awareness of women's rights among program participants.*

### ABSTRAK

Sebagai wujud transformasi responsif gender, pemerintah Kota Surabaya turut dalam proses pembangunan mengembangkan kebijakan pengarusutamaan gender. Dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kota Surabaya, diperlukan tindakan nyata dari Pemerintah Kota Surabaya dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan peraturan mengenai pengarusutamaan gender sebagai upaya penyelenggaraan kota responsif gender melalui berbagai program yang dapat memberdayakan perempuan. Kondisi tersebut menarik perhatian untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perempuan diberdayakan melalui adanya Perwali Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya. Hal ini di analisis dengan menggunakan perspektif teori pemberdayaan perempuan dari Naila Kabeer (1999), yang meliputi tiga dimensi utama: *resources* (sumber daya), *agency* (agensi), dan *achievements* (pencapaian). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui kebijakan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya tersebut telah dilaksanakan melalui berbagai program dan inovasi, seperti program Sekolah Perempuan (SEKOPER) Informal 'Srikandi', Musrenbang Perempuan, dan penguatan Kecamatan Responsif Gender (KRG) serta Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). Penelitian ini hanya berfokus pada satu program yaitu Sekolah Perempuan (SEKOPER) Informal 'Srikandi'. Program tersebut merupakan wadah pembelajaran bagi perempuan kelompok rentan atau single parents dengan tujuan memperkuat konsep motivasi diri dalam lingkungan sosial.

Pada perspektif sumber daya melalui program Sekolah Perempuan Srikandi terlihat pada peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan ekonomi. Dimensi agensi tergambar dari peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Sedangkan dari sisi pencapaian, terdapat dampak positif berupa peningkatan

pendapatan, rasa percaya diri, serta kesadaran akan hak-hak perempuan di kalangan peserta program.

## 1. Pendahuluan

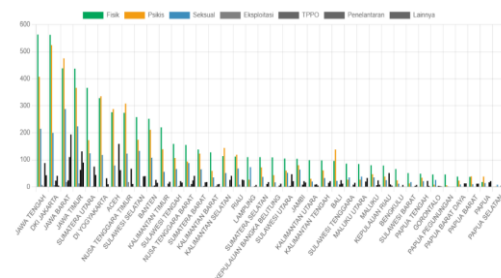
Populasi penduduk perempuan di Indonesia yang cenderung bertambah sering dipandang sebagai masalah kependudukan, dinamika keberadaan perempuan saat ini tidak lepas dari konteks pemberdayaan perempuan (Azzahrah, 2024). Pemberdayaan perempuan di Indonesia merupakan upaya yang komprehensif dan terpadu dari pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan (Ramadhina, 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menunjukkan tentang Hak Asasi Manusia, yang mengamanatkan adanya kaum perempuan berhak memperoleh hak-haknya dan dijamin oleh hukum. Untuk itu perlu adanya penunjang dalam memperkuat regulasi-regulasi yang telah diatur secara tertulis oleh pemerintah, kemudian pemerintah perlu menciptakan suatu strategi kebijakan tentang pengarusutamaan gender.

Sejalan dengan itu, dalam konteks pembangunan berkelanjutan Undang-Undang menjadi landasan untuk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menyusun strategi, program, atau dokumen berupa kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan publik (Shafira, 2024). Kesetaraan gender dimaksudkan untuk memberikan persamaan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki di lingkungan masyarakat dalam memimpin dan memenuhi kebutuhan hidupnya (Putri, 2024).

Tercapainya kesetaraan gender bertujuan untuk menormalisasi perbedaan kebutuhan, prioritas dan cara penyelesaian masalah antara laki-laki dan perempuan sehingga akan menjadi konstruksi sosial di masyarakat (Putri, 2024). Adanya perbedaan gender dapat memicu suatu masalah apabila menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi yang utamanya dirasakan oleh kaum perempuan. Bentuk dari ketidakadilan tersebut umumnya di dalam suatu lingkungan masyarakat adalah stereotipe, kekerasan, dan budaya patriarki yang melekat pada masyarakat, khususnya negara berkembang, membuat perempuan

lebih sering dikaitkan dengan permasalahan gender dibanding laki-laki (Yulistiyani, 2024).

Berdasarkan data yang telah diuraikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak Perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus.

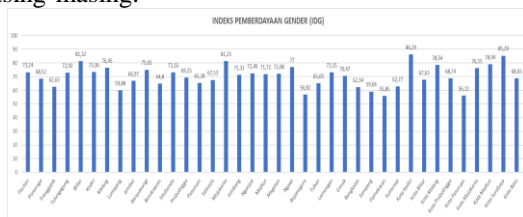


Sumber: KPPPA (2024)

Berhubungan dengan permasalahan gender, presentase jumlah yang ada antara perempuan dan laki-laki cukup seimbang. Berdasarkan hasil data sensus 2023 menunjukkan jumlah penduduk berkelamin perempuan adalah sekitar 137,90 juta jiwa, senada dengan ini menurut data dari Sistem Informasi Gender dan Anak KEMENPPPA jumlah penduduk perempuan Indonesia adalah 49,92%. Secara rinci negara Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 1.916.906,77 km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik, 2022) terdapat keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 272.682.515 jiwa (Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, BPS 2021). Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 137,90 jiwa atau sekitar 28,24% dari total populasi di Indonesia adalah perempuan kelompok usia 0-17 tahun. Sisanya, sekitar 71,76%, adalah penduduk usia dewasa. Data tersebut mengarahkan

bahwa jumlah perempuan yang mendekati populasi jumlah laki-laki memberi potensi besar dalam meningkatnya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan di berbagai aspek kehidupan (Badan Pusat Statistik, 2023).

Mengenai berbagai fenomena permasalahan gender yang terjadi tersebut, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Timur terus mengupayakan berbagai pembangunan berbasis gender di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan di bidang pemerintahan. Salah satunya Kota Surabaya. Sebagai kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya menjadi kota kedua tertinggi yang memiliki Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 85,29 setelah Kota Kediri. Urgensi pembangunan kesetaraan gender dilakukan oleh berbagai lembaga untuk menjamin persamaan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan yang tercantum dalam konstitusi dasar UUD 1945 pada pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, yang menggaris besarkan bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam memperoleh berbagai sektor kehidupan. Hal lain didukung dan diperjelas melalui Keputusan Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan yang mewajibkan seluruh lembaga pemerintah di pusat maupun daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender yang tertuang dalam kebijakan dan program yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab masing-masing.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender melalui pembangunan responsif gender. Pemerintah dapat menghubungkan kompetensi individu dengan mengeksplorasi lingkungan sosial secara mendalam dengan membedakan masyarakat yang rentan untuk pemberdayaan dapat saling membantu untuk menciptakan suatu pemberdayaan komunitas yang responsif (Douglas D. Perkins, 1995). Pemberdayaan perempuan menunjukkan bahwa adanya partisipasi perempuan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan akses ke sumber daya, dan pemahaman mendalam terhadap konstruksi pengarusutamaan gender di Kota Surabaya.

Menurut berita pada Website resmi PRISMA Pusata Informasi Sahabat Perempuan Kartini Surabaya per tanggal 23 April 2024 dengan judul artikel "Sekolah Perempuan SEKOPER Day 1

Inovasi Srikandi". Dalam memperteguh dasar hukum pelaksanaan pembangunan responsif gender, Pemerintah Kota Surabaya membuktikan komitmen tertinggi dalam memajukan peran dan posisi perempuan dalam membangun masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan. Hal tersebut merupakan bentuk memberikan ruang bagi perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berspektif gender dalam perencanaan Kota (DP3AK, 2024). Disamping itu dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan. Secara khusus, mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan di wilayah pemerintahan Kabupaten/Kota (Mandasari, 2022).

Pada tahun 2025, Kota Surabaya melalui perangkat daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Perencanaan Keluarga Berencana berinovasi dalam mengembangkan potensi pemberdayaan perempuan di Kota dengan berkeadilan dan kesetaraan gender. Sekolah Perempuan (Sekoper) Informal 'Srikandi' merupakan wadah pembelajaran bagi perempuan kelompok rentan yang bertujuan untuk memperkuat konsep dan motivasi diri dalam lingkungan sosial. Metode yang digunakan melalui pendekatan yang praktis dan interaktif dalam sebuah pembelajaran yang akan membantu peserta menjadi individu yang lebih percaya diri serta sadar dan berdaya dalam bidang politik, hukum, sosial dan budaya. Program ini digagas sebagai bentuk memberikan pelatihan yang nantinya akan di implementasikan secara mandiri oleh peserta dalam bidang ekonomi (Dinas Kominfo, 2023).

Walikota Surabaya memberikan apresiasi kepada kampung yang memiliki inovasi program responsif gender di tingkat kecamatan se-Kota Surabaya. Kecamatan Responsif Gender (KRG) merupakan pembinaan kepada 31 kecamatan agar dapat memberikan pelayanan dan pembangunan yang inklusif. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari

kegiatan yang telah dilaksanakan di perkampungan Kota Surabaya. KRG juga memiliki sinergi dengan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) yang bertujuan menangani berbagai isu perempuan dan anak, diantaranya keterwakilan perempuan, anti kekerasan, anti pekerja anak, dan anti perkawinan anak. Para pemenang program inovasi responsif gender kategori pratama untuk KAS-RPA Juara 1 kampung belajar dan Juara 1 Kampung Asuh serta Juara 1 Kampung Kreatif-Produktif dimenangkan oleh RW 1 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo. Setelahnya dilanjutkan dengan Kelurahan Sidotopo yang mengemban Juara 1 Kampung Sehat dan Juara 1 Kampung Aman oleh RW 2 (Radio Republik Indonesia, 2024).

Kota Surabaya melalui perangkat daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Perencanaan Keluarga Berencana berinovasi dalam mengembangkan potensi pemberdayaan perempuan di Kota dengan berkeadilan dan kesetaraan gender. Sekolah Perempuan (Sekoper) Informal 'Srikandi' merupakan wadah pembelajaran bagi perempuan kelompok rentan yang bertujuan untuk memperkuat konsep dan motivasi diri dalam lingkungan sosial. Metode yang digunakan melalui pendekatan praktis dan interaktif dalam sebuah pembelajaran yang akan membantu peserta menjadi individu yang lebih percaya diri serta sadar dan berdaya dalam bidang politik, hukum, sosial dan budaya. Program ini digagas sebagai bentuk memberikan pelatihan yang nantinya akan di implementasikan secara mandiri oleh peserta dalam bidang ekonomi.

Untuk memperoleh pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dibutuhkan pendekatan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang melibatkan perubahan dari keadaan tidak mampu membuat pilihan hidup yang bermakna, menjadi individu yang mampu membuat dan menjalankan pilihan tersebut dalam konteks kehidupan nyata sebuah kerangka kerja analitis yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses pemberdayaan perempuan. Kerangka kerja ini pertama kali dikembangkan oleh Naila Kabeer pada tahun 1999. Pemberdayaan perempuan merupakan alat yang ampuh untuk memahami proses kebijakan, dan lebih khusus lagi, efektif dalam membuka peluang, meningkatkan kapasitas, serta mendorong transformasi sosial terhadap perempuan di Kota Surabaya melalui tiga dimensi: sumber daya, kemampuan bertindak, hasil atau pencapaian (Kabeer, 1999). Dalam suatu kebijakan yang menyuguhkan sebuah program hingga inovasi tentu melibatkan

banyak aktor dalam perumusan hingga pelaksanaannya. Semua pihak akan berkaitan satu sama lain.

Dalam Konteks pemberdayaan perempuan pengarusutamaan gender di Kota Surabaya, menarik untuk melihat bagaimana kebijakan dapat berkontribusi dalam memperluas ruang partisipasi perempuan untuk meningkatkan kapasitas serta agensinya dan memberikan hasil nyata dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itu peneliti mengambil judul "Pemberdayaan Perempuan Dalam Perwali Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya". Dalam penelitian ini akan mengelilingi proses melalui tiga dimensi yang berbeda: akses terhadap sumber daya (resources), kemampuan bertindak (agency), dan hasil atau pencapaian (achievements). Pemberdayaan tidak dapat diukur dari satu aspek. Ketiga dimensi ini tidak dapat dipisahkan karena makna pemberdayaan terletak pada hubungan antara ketiganya. Dengan menggunakan teori pemberdayaan perempuan, individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk membuat pilihan hidup yang strategis dalam kehidupan sosial, akan mampu memperoleh kemampuan tersebut dengan lebih memahami implikasi pemberdayaan perempuan dan mengatasi kompleksitas masalah yang mereka hadapi. Hal ini dapat mendukung perempuan dalam menentukan arah hidupnya, memperjuangkan haknya, dan mencapai perubahan dalam struktur sosial yang berkelanjutan.

## Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari istilah kata dasar yang mengandung arti "kekuatan", dan merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris yang disebut dengan "empowerment". Dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok masyarakat yang dilihat dalam sudut pandang pemerintah dianggap kurang beruntung (disadvantage) dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari. Memberikan kekuatan atau power kepada orang yang kurang beruntung atau powerless merupakan tanggungjawab pemerintah, namun juga mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program atau kegiatan pemberdayaan (Douglas D. Perkins, 1995).

Penggunaan istilah pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan paradigma pembangunan masyarakat (*community development*) yang muncul dari kritik terhadap paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Jim

Ife, “*empowerment means providing people with the resource, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community. Empowerment should be aim of all community development*”, pendapat tersebut mengemukakan bahwa pemberdayaan memiliki arti mendekati masyarakat pada sumber-sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan masa depan mereka dan untuk berperan serta di dalamnya, juga memberikan pengaruh pada kehidupan di komunitasnya. Oleh sebab itu pemberdayaan merupakan alat dari seluruh pembangunan masyarakat (J.W. Ife, 1995).

Kemudian dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Effendy (Onong Uchjana, 2017) mengandung makna tiga pengertian yaitu *enabling*, *empowering*, dan *maintaining*. Pertama *enabling*, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan. Kedua *empowering*, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan skill dan kemampuan manajerial. Ketiga *maintaining*, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.

## **Pemberdayaan Perempuan**

Menurut Naila Kabeer (Kabeer, 1999) pemberdayaan diartikan sebagai sebuah proses perubahan yang di mana mereka yang sebelumnya ditolak kemampuannya untuk membuat pilihan-pilihan strategis dalam hidup mereka, kemudian memperoleh kemampuan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan melalui perluasan kemampuan untuk membuat pilihan, bukan pada perbedaan dalam pilihan yang dibuat. Pada pemberdayaan perempuan tentunya terdapat beberapa proses atau tahapan yang saling terkait satu sama lain yang dimulai dari *resources* sebagai bentuk sumber daya manusia dan sosial dalam dukungan yang memungkinkan perempuan untuk membuat pilihan sampai mendapatkan hasil nyata untuk bertindak dan membuat pilihan dalam mencapai perubahan di masyarakat. Adapun pemberdayaan perempuan menurut Naila Kabeer (Kabeer, 1999) adalah sebagai berikut:

### **1. Resources (Sumber daya)**

Sumber daya dalam pemberdayaan perempuan diartikan sebagai prasyarat penting dalam pemberdayaan karena merupakan fondasi awal bagi seseorang untuk bisa membuat pilihan. Kaaber tidak hanya membatasi makna sumber daya pada aspek material, tetapi juga mencakup sumber daya manusia seperti, pendidikan dan keterampilan. Selain itu terdapat sumber daya sosial seperti, jaringan sosial dalam berbagai institusi seperti keluarga, pasar, dan komunitas. Akses terhadap sumber daya ini mencerminkan struktur sosial dan norma yang berlaku dalam menentukan siapa yang memiliki kuasa dalam distribusi dan penggunaan sumber daya tersebut.

### **2. Agency (Agensi)**

Agensi digunakan sebagai inti dari proses pemberdayaan dikarenakan sebagai bentuk menggambarkan kekuatan individu dalam menentukan tujuan dan bertindak untuk mencapainya. Agensi menekankan bahwa tidak hanya dalam bentuk keputusan formal, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk tak langsung seperti negosiasi, manipulasi, resistensi, bahkan refleksi internal. Agensi mencakup dua sisi kekuasaan. Pertama kekuatan untuk bertindak (*power to*). Kedua kekuasaan yang menekan pihak lain (*power over*). Dalam konteks perempuan, agensi mencerminkan kemampuan untuk menegosiasikan ulang peran, membentuk ulang identitas, dan menantang norma yang tidak adil.

### **3. Achievements (Pencapaian)**

Pencapaian merujuk pada hasil nyata dari kemampuan untuk mengakses sumber daya dan menggunakan agensi. Ini mencakup kesejahteraan individu maupun perubahan status sosial yang mencerminkan peningkatan dalam kualitas hidup. Namun, tidak semua pencapaian menunjukkan pemberdayaan. Misalnya, pencapaian yang berasal dari kepatuhan terhadap norma patriarkal belum tentu menunjukkan agensi yang kritis. Oleh karena itu, pencapaian perlu dilihat dari konteks sosial dan harus dianalisis apakah hasil tersebut mencerminkan adanya perubahan dalam struktur ketimpangan kekuasaan.

## **2. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif, mempersiapkan beberapa pertanyaan yang ditunjukkan untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi, sebagai data awal yang diperlukan kemudian di deskripsikan dalam bentuk kata-kata khusus dengan memanfaatkan metode ilmiah atau dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian deskriptif ini untuk melihat kejadian yang menjadi pusat perhatian kemudian diilustrasikan sebagaimana adanya. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, ini peneliti dapat menggambarkan dengan tepat apa yang

sedang diamati atau diteliti, memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang diteliti seperti gejala dan fakta yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif (*qualitative deskriptif research*), dimana dalam penelitian deskriptif ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kenyataan dari kejadian yang diteliti yang bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Perwali Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya

Sesuai dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya dimaksudkan untuk lebih menata perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Tujuan dengan adanya Perwali Nomor 43 tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, terciptanya keadilan berbasis gender, meningkatkan partisipasi perempuan yang berpedoman pada kesetaraan gender. Terlaksananya prinsip non diskriminatif tersebut diharapkan dapat di implementasikan kepada seluruh program dan kegiatan yang ada di lingkungan pemerintah Kota Surabaya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Perencanaan Keluarga Berencana sebagai dinas pelaksana program pengarusutamaan gender di Kota Surabaya, tidak hanya melaksanakan kegiatan terkait implementasi program tetapi juga memberikan advokasi bagi seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Surabaya. Advokasi yang diberikan mengenai penyusunan dokumen perencanaan berbasis keadilan gender *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Action Budget* (GAB), DP3APPKB menginisiasi bimbingan teknis dan pengumpulan dokumen seluruh penanggung jawab Perangkat Daerah dan Kelurahan di Kota Surabaya.

Selaras dengan itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya, program dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan. Sementara itu kegiatan pembangunan responsif gender tidak hanya dilakukan dalam skala pemerintah saja melainkan dibutuhkan kolaborasi antar stakeholder lain melalui

keterlibatan partisipasi masyarakat yang menyatakan bahwa setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha perlu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan responsif gender di daerah.

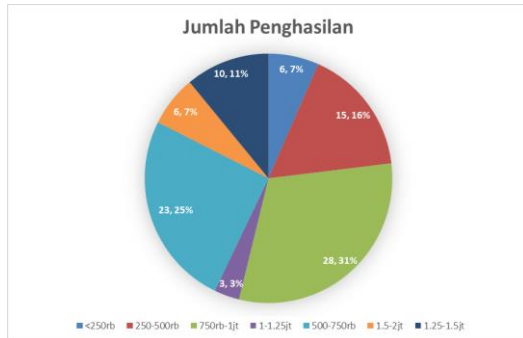
#### Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan bertema Sekolah Perempuan (Sekoper) Informal 'Srikandi' di Kota Surabaya

Upaya mengimplementasikan program Sekolah Perempuan (Sekoper) Informal 'Srikandi' di Kota Surabaya sudah berjalan dan dilakukan dengan proses yang detail dan terus diupayakan secara maksimal. Hal ini merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Perencanaan Keluarga Berencana dalam mendukung adanya kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Surabaya. Pada penelitian ini menerapkan teori pemberdayaan perempuan dari Naila Kabeer (1999) dimana dalam teori tersebut terdapat tiga variabel besar di dalamnya meliputi sumber daya (*resources*), agensi (*agency*), serta pencapaian (*achievements*). Dari masing-masing variabel tersebut juga terdapat indikator-indikator penting di dalamnya yang dapat mempengaruhi proses pemberdayaan perempuan. Secara keseluruhan program Sekolah Perempuan (Sekoper) Informal 'Srikandi' sebagai bentuk dalam mendukung pembangunan responsif gender di Kota Surabaya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang ada. Dari penyajian data atau dari data yang telah diperoleh kemudian diuraikan dalam pembahasan menurut beberapa indikator dalam teori Naila Kabeer adalah sebagai berikut :

#### Sumber Daya (*resources*)

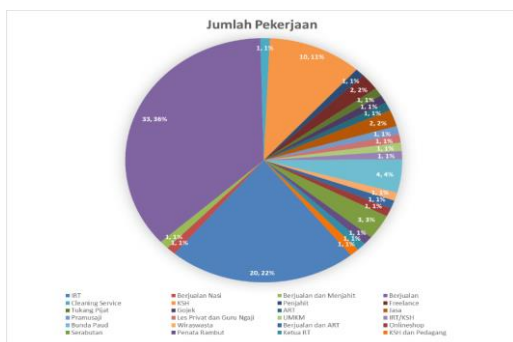
Pada konteks pertama yaitu sumber daya (*resources*) dimana dalam indikator ini Naila Kabeer membentuk kerangka kerja yang paling berpengaruh dalam pemberdayaan perempuan apabila terdapat semacam indikator di dalamnya yang mencakup sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial (Kabeer, 1999). Hal ini sejalan dengan pandangan penelitian terdahulu (Hanafie et al., 2016) bahwa sumber daya dijadikan sebagai aspek pertama dalam menjadi tolak ukur pemberdayaan perempuan. pada konteks pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Perempuan (Sekoper) Informal 'Srikandi' Surabaya dilaksanakan dalam rangka pelatihan bersama dengan pendampingan mentor sebagai bentuk kolaborasi dalam proyek. Ketiga indikator sumber daya menjadi penopang pelaksanaan program Sekolah Perempuan Informal agar program terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Adapun indikator sumber daya

ekonomi di dapatkan melalui penghasilan yang dimiliki oleh peserta.



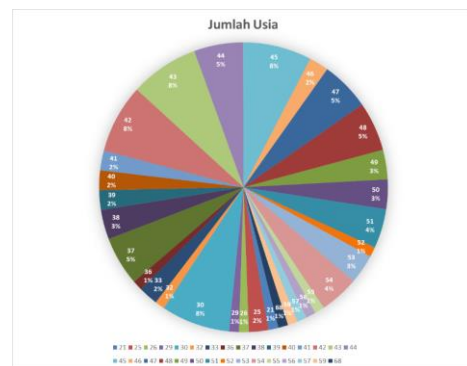
Sumber: Penulis, 2025

Selama tiga bulan program inovasi pemberdayaan perempuan Sekoper telaksana kategori jumlah penghasilan 28 orang yang mengikuti program Sekoper berada pada rentang penghasilan 750.000 rupiah sampai 1.000.000 juta rupiah dengan presentase 31% dari setengahnya. Sementara 23 orang berada pada rentang penghasilan 500.000 sampai 750.000 dengan presentase 25% dari setengahnya. Hal ini dibuktikan bahwa lebih dari setengah responden dengan presentase 56% memiliki penghasilan di bawah 1.000.000 juta rupiah. Selain itu, 15 orang berada pada kisaran penghasilan 250.000 sampai 500.000 ribu perbulan dengan presentase 16%. Ini menjadi subjek nyata bahwa perempuan yang menjadi subjek pemberdayaan perempuan berasal dari kelompok ekonomi rentan. yang dikategorikan sebagai ekonomi rentan. Namun ada ketegori masyarakat dengan penghasilan diatas 1.000.000 sampai 1.500.000 juta rupiah dengan total 3 orang di dalamnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi rentan. Sehingga distribusi penghasilan ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan hidup dengan penghasilan di bawah UMR Kota Surabaya. Ini menggambarkan kondisi kerentanan ekonomi yang menjadi salah satu sasaran utama intervensi kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Surabaya.



Sumber: Penulis, 2025

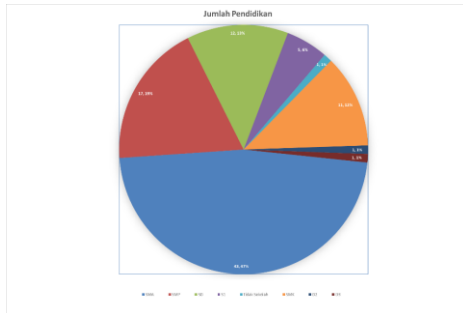
Selanjutnya indikator sumber daya manusia di hasilkan dari pekerjaan yang dimiliki oleh peserta. Dapat dilihat pada diatas menunjukkan bahwa selama tiga bulan program inovasi pemberdayaan perempuan Sekoper telaksana rata-rata pekerjaan 33 orang memiliki pekerjaan non formal sebagai pedagang dengan presentase tertinggi 36% dari total keseluruhan. Hal ini menunjukkan dominasi sektor informal sebagai sandaran utama ekonomi keluarga masyarakat perempuan. Selain itu tersebar merata dalam berbagai pekerjaan informal seperti penjahit, ART, freelance, cleaning service, tukang pijat, UMKM, jasa, pramusaji, dan serabutan, masing-masing berkisar pada presentase kurang dari 5%. Selanjutnya jumlah masyarakat dengan posisi presentase tertinggi kedua ditempati oleh ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 20 orang dengan presentase 22%. Ini menunjukkan dominasi sektor informal memiliki kelompok potensial untuk diberdayakan melalui pelatihan produktif dalam inovasi program pemberdayaan perempuan.



Sumber: Penulis, 2025

selama tiga bulan program inovasi pemberdayaan perempuan Sekoper telaksana kategori jumlah penghasilan 28 orang yang mengikuti program Sekoper berada pada rentang penghasilan 750.000 rupiah dsampai 1.000.000 juta rupiah dengan presentase 31% dari setengahnya. Sementara 23 orang berada pada rentang penghasilan 500.000 sampai 750.000 dengan presentase 25% dari setengahnya. Hal ini dibuktikan bahwa lebih dari setengah responden dengan presentase 56% memiliki penghasilan di bawah 1.000.000 juta rupiah. Selain itu, 15 orang berada pada kisaran penghasilan 250.000 sampai 500.000 ribu perbulan dengan presentase 16%. Ini menjadi subjek nyata bahwa perempuan yang menjadi subjek pemberdayaan perempuan berasal dari kelompok ekonomi rentan. yang dikategorikan sebagai ekonomi rentan. Namun ada ketegori masyarakat dengan penghasilan diatas 1.000.000 sampai 1.500.000 juta rupiah dengan total 3

masyarakat di dalamnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi rentan. Sehingga distribusi penghasilan ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan hidup dengan penghasilan di bawah UMR Kota Surabaya. Ini menggambarkan kondisi kerentanan ekonomi yang menjadi salah satu sasaran utama intervensi kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Surabaya.



Sumber: Penulis, 2025

mayoritas peserta program inovasi pemberdayaan perempuan Sekoper setengahnya dari lulusan SMA sebanyak 43 orang dengan presentase 47% . selaras dengan ini 19% dari setengahnya merupakan lulusan SMP dengan posisi kedua berjumlah 17 orang. Sedangkan 12 orang dengan presentase 13% merupakan lulusan SD. Dan hanya 1 orang dengan presentase 1% yang tidak menempuh pendidikan sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang menjadi sasaran kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Surabaya memiliki latar belakang pendidikan menengah kebawah. Hal ini menjadi indikator penting dalam perumusan program pemberdayaan yang inklusif. Namun terdapat temuan data adanya masyarakat dengan pendidikan tinggi seperti S1, D2, dan D3 dengan diikuti presentase sebesar 8% berjumlah 7 orang. Hal ini menimbulkan adanya kesenjangan dalam sasaran kegiatan. Sasaran tersebut merupakan kelompok masyarakat dengan kategori latar belakang pendidikan menengah kebawah. Dari temuan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa distribusi sasaran kegiatan dalam aspek pendidikan masih belum merata fakta dilapangan masih menemukan adanya masyarakat yang berpendidikan tinggi dengan gelar Sarjana S1, D2 dan D3. Pada dasarnya masyarakat tersebut sudah memumpuni dalam mendapatkan ilmu, pengetahuan dan wawasan dari menempuh pendidikan tinggi. Sehingga sasaaran kegiatan dari program ini dibutuhkan dari kalangan masyarakat yang masih belum cukup dalam mendapatkan haknya untuk mencapai pendidikan dengan baik.

#### Agensi (agency)

Indikator berikutnya pada variabel teori pemberdayaan perempuan oleh Naila Kabeer mengungkapkan bahwa pentingnya agensi perempuan dalam proses pemberdayaan. Agensi dalam proses pemberdayaan mengacu pada kemampuan perempuan untuk bertindak dalam menentukan tujuan secara mandiri dan membuat pilihan dengan pengambilan keputusan melalui negosiasi, tawar menawar dalam sebuah keadaan untuk mencapai kehidupan mereka. Ini melibatkan peningkatan kapasitas perempuan untuk memahami hak-hak mereka dan mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Agensi bisa berupa makna, motivasi, refleksi, kapasitas analisis dan tujuan dari tindakan individu. Pada aspek agensi ini menurut Naila Kabeer (1999) terdapat tiga indikator yang dapat merujuk pada kemampuan perempuan untuk bertindak berdasarkan pilihan-pilihan mereka dan mewujudkan hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan program Sekolah Perempuan (Sekoper) 'Srikandi' Informal Kota Surabaya dirancang untuk membangun kepercayaan diri peserta agar mampu menyuarakan pendapat dan mengambil keputusan secara mandiri. Selaras pada indikator kemampuan membuat keputusan yang diberikan adalah berupa pemahaman materi konsep diri dan manajemen diri. Selain itu masyarakat juga diberikan pembelajaran konsep kesetaraan gender dan peran hak kewajiban agar dapat berdaya dalam berbagai bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat perempuan dapat memiliki kemampuan membuat keputusan dengan mengembangkan diri melalui visi misi yang dibetuk dalam dirinya. Dengan demikian kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan dapat dipengaruhi dari berbagai aspek salah satunya adalah kepercayaan diri yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat manfaat dari diadakannya program pelatihan Sekolah Perempuan Informal. Masyarakat merasakan kesadaran bahwa pentingnya hak sebagai perempuan dalam menyuarakan pendapat, gagasan serta aspirasinya dalam kehidupan bersosial. Terbukanya wawasan dapat menjadi sebuah visi dan misi baru bagi perempuan untuk meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya.

Selaras dengan itu, Peserta didorong untuk aktif dalam diskusi, refleksi diri, *role-playing*, hingga presentasi pribadi yang melatih keberanian tampil di ruang publik. indikator pada kemampuan dalam bertindak kerap dirasakan oleh masyarakat dari hasil keikutsertaan dalam program pelatihan Sekolah Perempuan. Hal ini dibuktikan dengan pengembangan diri dan keberanian untuk melawan rasa takut dalam diri sendiri. Dukungan yang diberikan oleh



pemerintah dalam bentuk pelatihan dalam aspek ekonomi melalui pelatihan coking class dan make up class dibutuhkan implementasi secara nyata. Implementasi tersebut dapat berupa keberanian dalam membuka usaha kecil yang akan berdampak pada perekonomian perempuan dalam membangun keluarga berkualitas. Dengan demikian aspek pengembangan diri dapat mengikuti ketercapaian yang ada dalam pemberdayaan perempuan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan mentor dan fasilitator yang mendampingi peserta dalam proses penguatan mental dan sosial sehingga aspek keberanian dan pengembangan diri dapat terseleraskan dengan kemampuan mempengaruhi pada indikator ketiga. Kemampuan dalam mempengaruhi dapat terbentuk melalui beberapa stakeholder yang turut berkontribusi dalam pencapaiannya. Hal ini dibuktikan dengan jangkauan masyarakat dalam mendapatkan akses informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi pemberdayaan perempuan. pemerintah melalui inovasi program mengharapkan adanya keterbentukan suatu kelompok dari seluruh lapisan masyarakat bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat terutama kelompok rentan untuk memperoleh hak yang layak dan akses dapat terpenuhi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan.

#### **Pencapaian (*achievements*)**

Hasil analisis menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan melalui inovasi Sekolah Perempuan Informal menunjukkan bahwa dalam pendistribusian masih belum merata. Hal ini dibuktikan adanya partisipasi perempuan dengan latar belakang pendidikan tinggi lulusan S1 sebanyak 5,5% dengan pekerjaan formal yang terakomodasi. Sedangkan kelompok tersebut juga memiliki potensi besar untuk berperan sebagai penggerak komunitas atau fasilitator lokal. Ketimbangan ini mengindikasikan bahwa pendekatan program Sekolah Perempuan Informal belum bersifat inklusif dan belum menyentuh keseluruhan lapisan perempuan dalam masyarakat.

Pelatihan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan dalam kesadaran diri, kemampuan membuat keputusan, serta keberanian untuk menyuarakan pendapat. Program pelatihan yang menitikberatkan pada pengembangan diri, konsep kesetaraan gender, dan keterlibatan aktif dalam diskusi maupun refleksi diri telah membuka wawasan perempuan dalam memahami hak-haknya. Ini menjadi bukti awal pencapaian bahwa perempuan mulai mampu membentuk visi hidupnya sendiri,

memahami peran sosialnya, serta terlibat dalam pengambilan keputusan di lingkungan keluarga maupun komunitas. Menghasilkan pencapaian yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis. Perempuan yang awalnya berada dalam kondisi ekonomi dan sosial terbatas kini mulai menunjukkan kemajuan dalam hal keberdayaan diri, akses informasi, serta kemampuan membangun jaringan sosial. Meski terdapat ketimpangan dalam pencapaian, seperti masih adanya peserta dari latar belakang pendidikan tinggi yang tidak sesuai sasaran, secara umum indikator pencapaian menunjukkan pergeseran yang positif dalam posisi perempuan sebagai subjek aktif pembangunan.

Secara keseluruhan, program Sekoper Srikandi telah mampu menghasilkan pencapaian yang bermakna dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan di Kota Surabaya, khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Peningkatan ini menjadi indikator keberhasilan awal dari proses pemberdayaan, sekaligus menjadi dasar kuat bagi perumusan kebijakan lanjutan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Program Sekoper “Srikandi” tidak hanya fokus pada aspek pelatihan teknis, namun juga mendorong transformasi sosial melalui perubahan pola pikir, peran, dan posisi perempuan dalam struktur masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pengarusutamaan gender yang diterapkan melalui program ini telah membuktikan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek kesetaraan gender.

## **4. Kesimpulan**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti terhadap inovasi pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Perempuan (SEKOPER) Informal ‘Srikandi’ Kota Surabaya sebagai wujud dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan perempuan, khususnya di wilayah Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Program ini telah mampu meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keterampilan teknis melalui pelatihan *cooking class* dan *make up class* hingga peningkatan jaringan sosial serta kesadaran terhadap hak dan peran gender mereka. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa distribusi program belum merata. Terdapat ketimpangan dalam sasaran kegiatan peserta yang

seharusnya menyoasar kelompok rentan, tetapi fakta dilapangan masih didominasi oleh perempuan yang telah memiliki ikatan hubungan dengan pemerintah seperti Kader Surabaya Hebat (KSH) dan Bunda Paud. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya pemerataan pada perempuan dari golongan tidak berpenghasilan atau berpenghasilan rendah yang tidak seluruhnya terfasilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa indikator sasaran program belum sepenuhnya terimplementasi secara menyeluruh. Sehingga dapat dikatakan bahwa program SEKOPER (Sekolah Perempuan Informal 'Srikandi' telah mampu menghadirkan peningkatan akses terhadap sumber daya dan memperkuat agensi perempuan. Beberapa peserta bahkan telah memiliki usaha mandiri atau aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Namun, untuk menciptakan pencapaian yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial, perlu adanya pemetaan yang lebih baik terhadap kelompok-kelompok perempuan yang benar-benar membutuhkan program ini.

### Saran

Perlunya monitoring dan evaluasi dengan menyatukan prinsip-prinsip keadilan gender serta melibatkan perwakilan perempuan dari kelompok masyarakat umum kelas menengah kebawah. Hal ini akan memastikan adanya partisipasi aktif dari masyarakat serta menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Selain itu diperlukan adanya penguatan jaringan kemitraan dari berbagai pihak untuk pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu diperlukan juga tindak lanjut berupa pendampingan usaha dan penguatan organisasi perempuan di wilayah masing-masing guna memperkuat terlaksananya program yang telah diusung.

### 5. Referensi

- Azzahrah, M. K. R. (2024). *Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Terhadap Pemberdayaan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Kasus Desa Doho Kecamatan Dolopo)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2022*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkJMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi--2021.html?year=2021>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Women and Men 2023 in Indonesia Bps-Statistics Indonesia. Women*

*and Men in Indonesia 2023, 14, 1–70.*

- Dinas Kominfo, P. J. T. (2023). *Surabaya Terus Berupaya Jadi Kota Responsif Gender*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/surabaya-terus-berupaya-jadi-kota-responsif-gender>
- Douglas D. Perkins, M. A. Z. (1995). Empowerment Theory, Research, And Application. *American Journal of Community Psychology, 23(05)*, 570–579. <https://doi.org/110.1007/bf02506982>
- DP3AK, P. J. T. (2024). *Surabaya Responsif Gender, Pemkot Gelar Musrenbang Perempuan dalam Penyusunan RKPd 2025*. <https://dp3ak.jatimprov.go.id/public/berita/link/2711>
- FadyaRamadhina, W .R. (2025). *Pengaturan Pemberdayaan Perempuan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender. Volume 2*, (<https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Amicuscuriae/Issue/View/1316>), Halaman 206-220. <https://doi.org/10.25105/Wsyk6207>
- Hanafie, H., Rosyidah, I., Nugraha, A., & Huda, M. (2016). Pengembangan Skill Pengolahan Ikan bagi Perempuan Pesisir di Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42003>
- J.W. Ife. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives - Vision, Analysis and Practice*. Longman Australia.
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements : Reactions on the Measurement of Women's Empowerment P1 Pt Scope. *Development and Change, 30* (May), 435–464.
- Mandasari, N. (2022). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi). *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal), 2(2)*, 50–59. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v2i2.17>
- Onong Uchjana, E. (2017). *Ilmu Komunikasi : Teori Dan Praktek*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, B. 2021. (2021). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics->

Table/2/Mtk3nsmy/Jumlah-Penduduk-  
Pertengahan-Tahun.Html

- Putri, S. D. N. A. S. (2024). Kesetaraan Gender Dalam Kerangka Good Cultural Governance (Studi Tentang Peran Kader Surabaya Hebat Dalam Pembangunan Masyarakat Di Kecamatan Wonokromo). *Skripsi*. <https://Repository.Unair.Ac.Id/>
- Radio Republik Indonesia. (2024). *Walikota Eri Cahyadi Beri Penghargaan Kampung Responsif Gender*. <https://rri.co.id/daerah/973415/walikota-eri-cahyadi-beri-penghargaan-kampung-responsif-gender>
- Shafira, N. N. (2024). *Gender Analysis Pathway Pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021: Mengatasi Ironi Fakta Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*. Universitas Airlangga.
- Yulistiyan, N. (2024). *Ketidakadilan Gender Dalam Kumpulan Cerpen Sagra Karya Oka Rusmini* (Vol. 15, Issue 1).